

Pemanfaatan Artificial Intelligence Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Irza Setiawan

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Korespondensi : irzasetiawanybm@gmail.com

Abstrak

Penggunaan Artificial Intelligence di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih di fokuskan kepada peningkatan kompetensi pegawai pemerintahan seperti adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pelatihan koding dan AI yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak dan Teknologi Komunikasi (BGTK) Kalimantan Selatan, selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mulai berinisiatif kepada inovasi aplikasi digital untuk pelayanan publik, meskipun belum spesifik berfokus kepada AI, berfokus kepada pemahaman secara mendalam tentang bagaimana jalannya Artificial Intelligence serta pemanfaatannya, disertai apakah ada aturan yang mengatur penggunaan Artificial Intelligence, ketersediaan teknologi, dan bagaimana kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan Artificial Intelligence di pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan pendekatan fenomenologi, adapun desain penelitian di awali dengan study pustaka dengan pengumpulan data-data tentang penggunaan Artificial Intelligence di pemerintahan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kata kunci : Artificial Intelligence, Kompetensi Pegawai, Administrasi Digital.

Abstract

The use of Artificial Intelligence in Hulu Sungai Utara Regency is still focused on improving the competence of government employees such as the training and development of teacher competencies in Hulu Sungai Utara Regency such as coding and AI training organized by the South Kalimantan Teacher Movement and Communication Technology Center (BGTK), in addition to that, the Hulu Sungai Utara Regency Government has also begun to take the initiative to innovate digital applications for public services, although not specifically focused on AI, focusing on a deep understanding of how Artificial Intelligence works and its utilization, accompanied by whether there are rules governing the use of Artificial Intelligence, the availability of technology, and how the competence of human resources in implementing Artificial Intelligence in the Hulu Sungai Utara Regency government, with a phenomenological approach, the research design begins with a literature study by collecting data on the use of Artificial Intelligence in the Hulu Sungai Utara Regency government.

Keyword: Artificial Intelligence, competency of civil servants, Digital Administration

1. PENDAHULUAN

Penggunaan Teknologi semakin marak kalangan masyarakat yang tentunya ini memicu kepada perubahan secara radikal yang sangat mempengaruhi aspek perilaku dan tatanan kehidupan, ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagaimana kiranya penggunaan teknologi digunakan untuk kebermanfaatan, secara fenomena hal ini diawali dengan maraknya ponsel yang sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang berefek kepada penggunaan internet dan menghasilkan kepada banyaknya data diri masyarakat yang tercipta melalui media sosial, Di Negara Indonesia sendiri jumlah penduduk yang di data oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 mencapai 286.693.693 jiwa, dengan tingkat pengguna Internet mencapai 229.400.000 jiwa dimana pengguna terbanyak berasal dari Pulau Jawa mencapai 58% kemudian Sumatera 20,5% dan wilayah lainnya, ini menunjukkan bahwa hampir seluruh

masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet yang tentunya hal ini sangat membantu bukan hanya dalam kecerdasan berperilaku, namun juga kecerdasan dalam menggunakan teknologi.

Administrasi Publik jikalau dilihat dari dimensi maka akan mencakup berbagai macam aspek seperti kebijakan, organisasi, manajemen, moral dan etika, lingkungan, serta akuntabilitas kinerja dimana keenam dimensi ini sangat erat berkaitan penting dalam pelayanan kepada masyarakat, perpaduan teknologi yang bisa digunakan dalam dimensi administrasi public dibarengi dengan masyarakat yang sudah mulai melek teknologi ini akan sangat membantu dalam hal yang berkaitan dengan administrasi public untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada mulanya penggunaan administrasi publik dalam hal menunjang dimensi baik kebijakan, kinerja, pelayanan, manajemen dan lain sebagainya dimulai dari perubahan menjadi administrasi digital, dimana hal yang dulunya dilakukan secara manual baik data-data kinerja, pelayanan kepada masyarakat, manajemen kearsipan serta aspek lain yang dulunya dikerjakan secara manual, kini perlahan sudah mulai terdigitalisasi, hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang, ditopang dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam digitalisasi tersebut.

Perubahan kepada administrasi digital ini selain mempermudah pelayanan kepada masyarakat, juga sangat menunjang kinerja dari birokrasi, dimana adanya penghematan kertas-kertas karena segala surat menyurat, dokumen dan lainnya dengan wujud kertas berubah kearah digital, selain itu kearsipan yang dulunya memerlukan sarana lemari penyimpanan kini juga menjadi lebih efektif karena dokumen serta data tersimpan dalam bentuk digital, apalagi setiap laporan kinerja saat ini sudah terdigitalisasi, dimana perangkat ponsel pintar sudah menjadi kebutuhan wajib bagi para Aparatur Sipil Negara.

Namun Administrasi Digital bukan berarti tidak ada permasalahan, karena perubahan zaman dengan peningkatan teknologi, juga harus diimbangi oleh kemampuan sumber daya manusia untuk menggunakannya serta di topang dengan adanya sarana penunjang kegiatan tersebut, karena ketersediaan sarana sebagai perubahan menuju administrasi digital tidak akan bisa maksimal jikalau penggunaanya tidak bisa menggunakan sarana tersebut.

Belum habis pembicaraan tentang perubahan dinamika menuju administrasi digital, kini public kembali dihebohkan dengan hadirnya Artificial Intelligence, sebenarnya Artificial Intelligence tidak ada hubungannya dengan kecerdasan manusia, namun dimodelkan untuk mensimulasikan kecerdasan manusia, pemrosesan data digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan akusisi data digunakan untuk memahami tujuan lebih baik, Artificial Intelligence mengandalkan algoritme untuk mencapai hasil (Dr. Hendra Jaya et al., 2018).

Artificial Intelligence jika dihubungkan dengan Administrasi Publik bisa menjadi inovasi yang lebih bagus dalam hal kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat, ini bisa mentransformasikan dengan otomatisasi tugas rutin seperti memudahkan pendataan serta pembuatan surat menyurat pelayanan publik, tugas-tugas pun menjadi lebih kreatif dengan informasi yang lebih mudah untuk didapatkan, dengan adanya Artificial Intelligence pemrosesan data, verifikasi dokumen dan pengisian formulir lebih mudah dalam mempercepat layanan dan mengurangi kesalahan manusia.

Namun tentunya yang namanya Artificial Intelligence tetaplah hanya sebuah alat pendukung, hanya bisa mengumpulkan data dan informasi dan hasilnya pun sesuai dengan informasi yang tersedia di alat tersebut, tentunya tidak bisa menggantikan kecerdasan manusia secara keseluruhan, jadi harus ada kolaborasi yang efektif juga antara Artificial Intelligence dengan Sumber Daya Manusia yang bagus dalam pelaksanaan untuk mendukung sistem dalam Administrasi Publik, Berdasarkan kajian secara empiric penggunaan Artificial Intelligence di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih di fokuskan kepada peningkatan kompetensi pegawai pemerintahan seperti adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pelatihan koding dan AI yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak dan Teknologi Komunikasi (BGTK) Kalimantan Selatan dengan tujuan agar para pendidik bisa menggunakan teknologi modern dalam proses belajar mengajar, selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Utara juga mulai berinisiatif kepada inovasi aplikasi digital untuk pelayanan publik, meskipun belum spesifik berfokus kepada AI, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkomitmen pada keterbukaan informasi melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ini merupakan sebuah langkah untuk mendukung ekosistem digital yang lebih luas.

Adapun hal yang menjadi isu atau tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap penggunaan Artificial Intelligence adalah seperti akses yang belum merata, meskipun sudah banyak program-program pelatihan kepada pegawai namun kesenjangan akses terhadap layanan dan teknologi menjadi fenomena permasalahan seperti kapasitas pegawai yang dihubungkan dengan infrastruktur teknologi yang berbasis pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya menjadi belum optimal.

Penelitian ini difokuskan kepada penggunaan Artificial Intelligence yang dihubungkan dengan dimensi Administrasi Publik apakah bisa menopang sistem pelayanan masyarakat dengan basis kebijakan, organisasi, manajemen, etika dan moral, lingkungan serta akuntabilitas kerja. Implementasi Artificial Intelligence telah menunjukkan sebuah transformasi dalam pelayanan publik, dimana inovasi seperti chatbot cerdas, sistem otomatisasi dokumen, analisis prediktif, serta mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi waktu tunggu layanan serta meningkatkan kepuasan masyarakat (Suriadi et al., 2024)

Kontribusi teoritis akan sangat membantu dalam kajian ilmiah dimana secara empiris administrasi publik yang dihubungkan dengan Artificial Intelligence sangat membantu kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik secara luas sehingga berdampak kepada implikasi praktis untuk menjadi rekomendasi para pemerintah dalam menerapkan hal ini untuk terus berinovasi bersama sumber daya manusia yang mempunyai keahlian agar dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan zaman.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus kepada pemahaman secara mendalam tentang bagaimana jalannya Artificial Intelligence serta pemanfaatannya, disertai apakah ada aturan yang mengatur penggunaan Artificial Intelligence, ketersediaan teknologi, dan bagaimana kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan Artificial Intelligence di pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan pendekatan fenomenologi, adapun desain penelitian diawali dengan studi pustaka dengan pengumpulan data-data tentang penggunaan Artificial Intelligence di pemerintahan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara yang dihubungkan dengan berbagai macam referensi dan jurnal-jurnal yang tersedia dengan tema sejenis, kemudian menggali ke lapangan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang digunakan untuk melakukan kajian hasil kompetensi pegawai dalam penggunaan Artificial Intelligence, penggunaan berbagai macam teori untuk dihubungkan dengan kajian empiris di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa tantangan dalam implementasi Artificial Intelligence adalah seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan data, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, dan kerangka regulasi yang belum komprehensif, strategi yang harus dimunculkan mencakup investasi berkelanjutan, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, manajemen perubahan, kerangka kebijakan adaptif, dan pembangunan kultur inovasi digital (Suriadi et al., 2024)

Artificial Intelligence memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dapat menggunakannya dalam mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi administrasi, serta menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat, teknologi ini menjadi alat bantu yang sangat efisien bagi birokrasi, lebih terbuka dan responsif, karena itu Artificial Intelligence memiliki potensi besar sebagai revolusi pelayanan public jika didukung dengan regulasi yang jelas, infrastruktur yang memadai, dan sumber daya manusia yang kompeten (Seulalae et al., 2025)

(Igamo et al., 2025) Untuk mendukung pelaksanaan Artificial Intelligence, maka diperlukan pelatihan kepada pegawai dalam hal penggunaannya, pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam hal tugas-tugas administratif agar lebih efisien dan sistematis, kemampuan ini sangat membantu dalam hal pelayanan publik, penyusunan laporan, analisis data, serta penyelesaian tugas rutin lainnya, profesionalisme dan transparansi merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh Aparatur Pemerintah karena itu merupakan kunci kesuksesan (Irza Setiawan, 2024)

Untuk sepenuhnya mewujudkan potensi Artificial Intelligence di Indonesia, para pembuat kebijakan harus membuat kerangka tata kelola AI, pembentukan badan tata kelola AI yang terkoordinasi dengan pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan penggunaan AI bisa diterapkan secara efektif di seluruh sektor dan standar etika penggunaan harus dipertahankan secara konsisten, selain itu pengembangan standar etika khusus akan membantu mengatasi tantangan AI di berbagai bidang seperti perawatan kesehatan, keuangan dan pendidikan, serta mendorong penggunaan AI di berbagai industry dengan penuh tanggung jawab (Putu Yoga Bumi Pradana et al., 2025)

Kritik kepada penelitian terdahulu yang ada hanya terfokus kepada jalannya Artificial Intelligence atau tidak, sementara itu AI bukan hanya dilihat dari segi terimplementasi atau belum terimplementasi, namun tentang bagaimana dimensi administrasi public diprediksi, bagaimana arah dimasa depan dan terus menyesuaikan diri, kehadiran AI akan membuat kinerja maupun pelayanan menjadi lebih cepat, mudah serta efisien, namun ini juga harus ditopang dengan seperangkat kebijakan yang jelas, teknologi yang tersedia, dan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung.

Kehadiran Artificial Intelligence di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa memberikan potensi untuk pelayanan public di berbagai ruang lingkup seperti pelayanan administrative, pelayanan barang public, pelayanan jasa public, pelayanan pembangunan sampai pelayanan utilitas, misalkan dalam pelayanan perizinan, AI sangat membantu dalam proses pendataan dan surat menyurat, serta akses kemudahan yang lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tinggal bagaimana kompetensi dari pengguna serta sarana teknologi yang tersedia untuk bisa menggunakan AI tersebut.

Kerangka teoritis bisa disusun dari variabel yang ada, yaitu dimulai dari adanya seperangkat aturan yang jelas tentang tata kelola AI dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, ini diperlukan agar penggunaan AI tidak melanggar etika dari administrasi public, dengan adanya aturan yang jelas maka kompetensi sumber daya manusia bisa ditingkatkan agar menggunakan AI bukan hanya sekedar kemudahan dalam dimensi administrasi public, namun juga ditambah dengan keahlian menggunakan AI, serta tersedianya prasarana dan sarana teknologi yang tersedia, sehingga memudahkan implementasi penggunaan Artificial Intelligence dalam dimensi administrasi public.

1. Kebijakan Tentang Artificial Intelligence di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sampai sekarang masih belum ada kebijakan tertulis yang mengatur tentang penggunaan Artificial Intelligence di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meskipun penggunaan AI secara praktek di lapangan sudah mulai digunakan oleh para pegawai di lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti pencarian dan penggalian data dengan menggunakan ringkasan AI, penggunaan Chat GPT sebagai asisten virtual untuk memudahkan kinerja maupun pelayan kepada public dalam menjalankan tugas dalam hal surat menyurat, atau membantu dalam menganalisa teks, serta mendapatkan informasi secara relevan dan cepat.

Meskipun sampai saat belum ada kebijakan tertulis tentang penggunaan Artificial Intelligence di Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun penerapan teknologi di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara (SPBE), Peraturan Bupati ini menjadi landasan hukum bagi penggunaan teknologi informasi dalam administrasi Pemerintah Daerah. Kemudian adanya penerapan tanda tangan elektronik dalam rangka mewujudkan konsep smart city oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian (DiskominfoSandi).

Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk standarisasi dan keterbukaan data pemerintah, secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung mengacu kepada kebijakan dan peraturan nasional yang lebih umum terkait teknologi informasi dan sistem pemerintah digital. Dalam penerapan kebijakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kelompok sasaran, komitmen, persepsi, serta kepada moral, dan ini bisa menjadi aspek dalam penggunaan Artificial Intelligence (Setiawan, 2022)

2. Penggunaan Artificial Intelligence di Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pemanfaatan Artificial Intelligence di Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa diketahui dari adanya inisiatif dalam pemerintahan digital, pendidikan, serta layanan data pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara meskipun masih dalam tahapan dasar dalam penggunaannya, ini bisa diketahui dari adanya fitur “*Chat AI*” atau Asisten Data SDI HSU pada situs web resmi “Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Utara” hal ini menunjukkan adanya pemanfaatan AI dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal pengelolaan akses data Daerah, selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga sudah menuju kepada Kota Cerdas (*Smart City*) melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan penerapan tanda tangan elektronik di berbagai dinas dan kelurahan yang mencakup integrasi berbagai teknologi, ini merupakan potensi penggunaan AI di masa depan.

Selain itu dalam hal pelayanan serta partisipasi dari masyarakat, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menggunakan berbagai aplikasi digital untuk layanan public seperti program “LAPOR” untuk pengaduan masyarakat dan Aplikasi Puja Indah untuk jejaring inovasi daerah, yang menjadi bagian ekosistem digital secara luas, namun agar hal ini bisa dieksekusi lebih luas, partisipasi masyarakat juga menjadi pemicu penting agar program ini bisa berjalan lebih maksimal (Irza Setiawan, 2023)

3. Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam Penggunaan AI

Selain tersedianya sarana teknologi, kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi juga menjadi faktor penting dalam pemanfaatan AI, pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diadakan beberapa pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai seperti adanya pelatihan Koding dan pelatihan AI yang diikuti oleh 34 orang dari guru SD, SMP dan SMA di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Teknologi dan Komunikasi (BGTK) Kalimantan Selatan. Selain itu AI juga memiliki potensi besar dalam pertanian presisi, seperti pemantauan kesehatan tanaman, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daerah yang dipenuhi oleh Rawa dan perairan, dan para petani di daerah juga mulai mengadopsi metode pertanian modern seperti hidroponik. Secara keseluruhan, penggunaan AI di HSU sedang berkembang, terutama didorong oleh inisiatif pemerintah daerah dalam transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

4. KESIMPULAN

Kehadiran Artificial Intelligence di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa memberikan potensi untuk pelayanan public di berbagai ruang lingkup seperti pelayanan administrative, pelayanan barang public, pelayanan jasa public, pelayanan pembangunan sampai pelayanan utilitas, misalkan dalam pelayanan perizinan, AI sangat membantu dalam proses pendataan dan surat menyurat, serta akses kemudahan yang lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tinggal bagaimana kompetensi dari pengguna serta sarana teknologi yang tersedia untuk bisa menggunakan AI tersebut.

Sampai sekarang masih belum ada kebijakan tertulis yang mengatur tentang penggunaan Artificial Intelligence di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meskipun penggunaan AI secara praktek di lapangan sudah mulai digunakan oleh para pegawai di lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti pencarian dan penggalian data dengan menggunakan ringkasan AI, penggunaan Chat GPT sebagai asisten virtual untuk memudahkan kinerja maupun pelayan kepada public dalam menjalankan tugas dalam hal surat menyurat, atau membantu dalam menganalisa teks, serta mendapatkan informasi secara relevan dan cepat.

Adanya fitur “Chat AI” atau Asisten Data SDI HSU pada situs web resmi “Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Utara” hal ini menunjukkan adanya pemanfaatan AI dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal pengelolaan akses data Daerah, selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga sudah menuju kepada Kota Cerdas (*Smart City*) melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan penerapan tanda tangan elektronik di berbagai dinas dan kelurahan yang mencakup integrasi berbagai teknologi, ini merupakan potensi penggunaan AI di masa depan.

5. SARAN

Saran pertama adalah adanya Peraturan kebijakan tentang penggunaan Artificial Intelligence di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga regulasi khusus ini bisa menjadi tolak ukur penggunaan AI untuk menunjang kinerja serta pelayanan publik, kemudian yang kedua adanya pelatihan peningkatan kompetensi pegawai dalam hal penggunaan AI melalui pelatihan yang berefek kepada sumber daya manusia pada Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pemanfaatan Artificial Intelligence.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dr. Hendra Jaya, M. ., Drs. Sabran, M. P., Dr. Muh. Ma’ruf Idris, S.T, M. ., Dr. Yasser A. Djawad, ST., M. S., A. Ilham, A. M., & Ansari Saleh Ahmar, S.Si., M. S. (2018). Kecerdasan Buatan. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- [2] Igamo, A. M., Yarsah, W. N., & Raneo, A. P. (2025). Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemerintahan melalui Pelatihan Pemanfaatan Artificial Intelligence di Kota Palembang. *Room of Civil Society Development*, 4(1), 23–32.
- [3] Irza Setiawan. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara. *Jurnal Niara*, 16(1), 14–19. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13862>
- [4] Irza Setiawan. (2024). Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Niara*, 16(3), 479–483. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.17266>
- [5] Putu Yoga Bumi Pradana, I., Intan Berlian Kurniati Pah, T., Sasmita Wijayanti, N., & Saputra, B. (2025). Innovative Work Behaviour in Local Government: Innovation Process and Gender

- Differences. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 29(1), 9213. <https://doi.org/10.22146/jkap.101329>
- [6] Setiawan, I. (2022). *Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. 15(2), 331–339.
- [7] Seulalae, A. H., Fitrisia, A., & Fatimah, S. (2025). *Literature Review : Peran Artificial Intelligence untuk Mendukung Pelayanan Publik di Sektor Pemerintahan*. 9, 16047–16052.
- [8] Suriadi, H., Mulyono, M., & Lovita, W. (2024). Pemanfaatan Teknologi AI untuk Meningkatkan Kualitas dan Responsivitas Pelayanan Publik di Era Digital. *Jurnal Media Ilmu*, 3(2), 107–132. <https://doi.org/10.31869/jmi.v3i2.6069>